

NASKAH PUBLIKASI

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN DESA WISATA ALAM YANG MAJU

(Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara)

Tahun 2018

Oleh:

HERI SETIAWAN

20130520091

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si

19660920199202 163 016

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Fitri Purwaningsih, S.IP., M.Si

NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403 163 025

ABSTRAK

Desa wisata merupakan desa yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata dalam menikmati, mengenal, menghayati, dan mempelajari ke khasan desa dengan segala daya tariknya. **Tata kelola Pemerintah Desa** diharapkan mampu dalam pemberdayaan masyarakat lewat wisata dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pengalaman, meningkatkan wawasan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat desa plajan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Desa Plajan memiliki banyak sekali sumber daya alam yang bagus untuk dikembangkan dan yang saat ini sudah dimiliki. Meski memiliki potensi yang begitu banyak namun semua itu belum dikelola secara professional oleh masyarakat Desa Plajan sebab kesadaran dari masyarakat masih sangatlah minim, kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya alamnya juga belum baik. Sehingga, dalam hal ini tata kelola desa Plajan tidak terlepas dari unsur pemerintahan yang terdiri dari pimpinan dan perangkat desa. Selain itu, unsur masyarakat yang terlibat terdiri dari BPD, pokdarwis, dan warga Desa Plajan yang membantu dalam kegiatan pariwisata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif dengan metode pendekatan eksploratif*. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Desa Wisata Alam Plajan sendiri pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan-peraturan pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat yang sudah dibuat dalam undang-undang, perda, maupun perbup yang ada. Dalam pelaksanaannya sejauh ini masih terdapat kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan terus mengupayakan memperbaiki kelemahan tersebut penting untuk dilaksanakan. Tata kelola yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Plajan sudah cukup baik dalam mewujudkan **Desa Wisata Alam** yang maju, sehingga Desa Wisata Plajan disebut sebagai Desa Wisata Alam yang maju. Hal ini karena Desa Wisata Plajan memenuhi komponen Desa Wisata yang maju yaitu memiliki potensi Pariwisata, Seni, Budaya khas daerah setempat, lokasi Desa masuk dalam rute perjalanan paket wisata, adanya tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni, dan budaya, aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung program desa wisata, terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Saran dari penelitian ini yaitu perlu diadakannya pelatihan-pelatihan rutin untuk meningkatkan pengetahuan pengetahuan dan ketrampilan pengelola Desa Wisata, perlu meningkatkan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara potensi wisata yang ada.

Kata Kunci : *Tata Kelola, Pemerintah Desa, Desa Wisata*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan pulau kecil, luas wilayah darat 1,937 juta km², luas laut 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia, (Suharto, 2009). Berdasarkan data tersebut maka Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara, karena Indonesia adalah negara yang terkenal akan sumber daya alamnya, Indonesia juga disebut negara kepulauan oleh sebab itu Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat yang bagus untuk dijadikan objek wisata, contohnya wisata laut, wisata alam dan masih banyak lagi tempat yang bisa dijadikan objek wisata.

Provinsi Jawa tengah yang terdiri dari beberapa wilayah maupun daerah yang memiliki keunggulan-keunggulan yang menarik serta unik dalam bidang pariwisata. (Fauzan, 2013). Bidang pariwisata tersebut antara lain wisata alam seperti pantai, air terjun, hutan, dan kepulauan. Dan masih banyak lagi seperti wisata budaya, wisata kuliner dan lain-lain.

Kabupaten Jepara memiliki banyak sekali potensi yang sudah berkembang maupun yang baru dikembangkan. Jepara juga memiliki program-program pengembangan objek wisata alam dan budaya, (Anung Wicaksono, 2015). Maka dinas pariwisata kabupaten Jepara memiliki peran untuk mendorong atau membina masyarakatnya agar masyarakat

mau ikut serta dalam mengembangkan potensi alam yang melimpah tersebut. Pada dasarnya wisata alam dikelola atau dibangun oleh masyarakat pedesaan terpencil.

Pemerintah Desa adalah basis Pemerintahan terendah maka biasanya wilayah Pemerintah Desa menjadi sasaran aktifitas penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah, dalam struktur pemerintahan Indonesia yang penentuan berhasilnya pembangunan nasional yang merata, (Ahkam, 2018). Aspek yang perlu dibangun dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah mengelola sumber daya alam yang ada untuk menjadikan sebuah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan pemerintah dan masyarakat melalui penerimaan devisa, (Takariadinda Diana Ethika, 2016). Dalam hal ini hakikatnya pariwisata bisa mengembangkan objek wisata dan daya tarik wisatawan yang akan datang ke Desa melalui pariwisata yang didukung oleh dinas pariwisata dan dikelola oleh masyarakat supaya masyarakat juga dapat peningkatan penghasilannya. Pariwisata berbasis masyarakat adalah pengembangan pariwisata dengan tingkat ketertiban masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup, (Cifor, 2004).

Menurut Putra, S, H. (2017). Mengatakan bahwa tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan

sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang good governance. Desa Wisata merupakan cara supaya masyarakat dapat meningkatkan daya dan memperhatikan lingkungan hidup yang dimiliki masyarakat Desa, Peran Pemerintah Desa dibutuhkan agar bisa mengawasi dan meningkatkan daya masyarakat supaya mereka bisa lebih baik kedepannya.

KERANGKA TEORI

Tata Kelola Pemerintah Desa

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Putra (2017). Kesuksesan otonomi daerah berkaitan dengan tata kelola yang baik dan benar, didalam tata kelola yang baik ada sistem pemerintahan yang good governance.

Jdanli, S. Dalam Sutiono (2004) mengatakan bahwa Tata Kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. memberi contoh bahwa UNDP (United Nations Development Program) mendeskripsikan adanya 6 indikator untuk kesuksesan tata kelola yang baik yaitu:

- a. mengikutsertakan semua;
- b. transparan dan bertanggung jawab;
- c. efektif dan adil;
- d. menjamin supremasi hukum;

- e. menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
- f. memperhatikan yang paling lemah dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini peran pemerintah Desa sangatlah penting bagi masyarakat karena hanya pemerintah Desa atau perangkat Desa yang mempunyai wewenang dalam membantu masyarakat Desa untuk membangun potensi alam yang ada di Desa, itu lah gunanya peran pemerintah Desa apalagi untuk Desa wisata yang sudah jelas membutuhkan peran pemerintah Desa supaya masyarakat bisa menggali potensi yang ada di Desa tersebut.

DESA WISATA

Menurut Muchamad Zaenuri dalam bukunya mengatakan Undang Undang No. 9 Tahun 2010 tentang pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Menurut Putra (2006) dalam bukunya hadiwijoyo S, S, ada lima komponen Desa Wisata :

- a. Memiliki potensi pariwisata, seni, budaya khas daerah setempat.

- b. Lokasi Desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual.
- c. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni, dan budaya.
- d. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata.
- e. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Prinsip pengembangan Desa Wisata adalah salah satu produk alternative yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat,
- b. Menguntungkan masyarakat setempat,
- c. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat,
- d. Melibatkan masyarakat setempat,
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Kriteria yang mendasari prinsip pengelolaan Desa Wisata yaitu :

- a. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya Desa Wisata.

- b. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
- c. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
- d. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti dan Wiendu. 1993).

Desa maju atau Desa swasembada adalah Desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal, (Maryani dan Waluya, 2008). Untuk mengetahui Desa Maju Atau Desa Swasembada ada indikator - indikator sebagai berikut:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Keadaan alam
- c. Orbitasi
- d. Mata pencarian
- e. Produksi
- f. Pendidikan

- g. Saran prasarana
- h. Adat istiadat
- i. Kelembagaan
- j. Swadaya dan Gotong royong.

METODE PENELITIAN

penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *kualitatif dengan pendekatan eksploratif*. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab – sebab atau hal – hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik *wawancara dan dokumentasi*, jumlah wawancara penelitian ini adalah 10 nara sumber. Teknik analisis data ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification).

PEMBAHASAN

Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju

(Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Tahun 2018)

Wawancara dilakukan kepada petinggi desa, ketua pengelola desa, perangkat desa dan masyarakat. Beberapa pertanyaan yang sesuai dengan judul dan latar belakang masalah yang diteliti, sehingga jawaban tersebut sebagai data dalam bab ini.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

1. Mengikutsertakan Semua

Mengikutsertakan semua dapat diartikan sebagai partisipasi, partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dari hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah Desa mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam perumusan dan pengambilan keputusan mengenai Tata Kelola Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam mengikutsertakan semua yaitu *unsur pemerintah dan unsur masyarakat*.

mengikutsertakan semua atau partisipasi masyarakat baik secara lang maupun secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk proses akuntabilitas dalam tata kelola Desa. Pemerintah Desa Plajan mengikutsertakan semua mulai dari anak kecil, pemuda, hingga orang tua untuk ikut serta membangun dan mengelola Desa Wisata Plajan.

2. Transparan Dan Tanggung Jawab

Transparan dan tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang dapat memberikan akses informasi seluasnya kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang muncul sehingga bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara dan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata Plajan ini dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat beserta pengelola wisata dapat meningkatkan potensi wisata yang ada di Desa Plajan. Selain itu, pemerintah Desa juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan Desa Wisata Plajan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

3. Efektif Dan Adil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa peranan yang efektif dan adil telah diterapkan dalam tata kelola Desa Wisata Alam Plajan. (Suhardi, 2016).

masyarakat memiliki peran yang efektif dalam memanfaatkan kawasan lingkungan dan memperoleh pembagian pendapat yang adil dari kegiatan pariwisata. Dengan adanya kegiatan pariwisata maka tercipta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di desa plajan.

Dari hasil pembagian pendapatan kegiatan pariwisata dan juga lapangan pekerjaan yang baru masyarakat desa plajan mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga kualitas ekonomi di desa plajan juga meningkat. Peran masyarakat dalam mengelola Desa Wisata adalah dengan menjaga kerjasama dan mempromosikan Desa Wisata. Sistem pengelolaan seharusnya terbagi secara merata sesuai dengan perdes

yang berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat ketidak sesuaian pembagian anggaran antara perdes yang berlaku dengan penerapannya.

4. **Menjamin Supremasi Hukum**

sejak awal pembentukan Desa Plajan sebagai Desa Wisata sudah berlandaskan kepada peraturan yang berlaku yaitu peraturan yang dibuat dengan cara musyawarah dan disahkan oleh Petinggi Desa Atau Kepala Desa. Sampai pada akhirnya keluar Peraturan Bupati Nomor 50/105 Tahun 2015 yang mengatur tentang penetapan percepatan desa/kelurahan unggulan. Adapun program yang dibuat berdasarkan Perbup Nomor 50/105 Tahun 2015 yaitu:1. Desa percontohan 2. Desa berkembang 3. Desa vokasi 4. Desa peduli hutan 5. Desa mandiri pangan 6. Desa siaga 7. Desa wisata 8. Desa arsip 9. desa layak anak 10. Desa pelayanan terpadu.

Dari 10 program tersebut, Desa Plajan terpilih sebagai Desa Wisata, Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan wisata yang ada di Desa Plajan semakin berkembang dengan adanya bantuan dari pemerintah kabupaten jepara. Pembangunan di sektor wisata terus dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat sampai tahun 2018.

Tahun 2018 bupati jepara mengeluarkan Perbup Nomor 55/179 Tahun 2018 tentang penetapan lokasi Desa unggulan adapun program yang dibuat berdasarkan Perbup Nomor 55/179 Tahun 2018 yaitu:1. Desa percontohan 2. Desa vokasi 3. Desa mandiri pangan 4. Desa siaga 5. Desa wisata 6. Desa arsip 7. Desa layak anak 8. Desa

pelayanan terpadu. Dari 8 program tersebut, Desa Plajan terpilih kembali sebagai Desa Wisata, Maka dapat disimpulkan berdasarkan teori dan data primer diatas bahwa Desa Plajan mempunyai landasan hukum baik untuk mengelola dan menjadikan Desa Plajan sebagai Desa Wisata.

5. Prioritas Politik, Sosial, Dan Ekonomi Didasarkan Pada Konsensus Masyarakat.

Aspek lingkungan Sosial-budaya, ekonomi memang sangatlah penting untuk kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dilakukan oleh dan untuk manusia yang hidup di dalam kondisi sosial budaya dan kondisi ekonomi tertentu. Faktor ekonomi perlu mendapat perhatian, karena pembangunan tidak akan dapat berkelanjutan apabila ekonomi tidak mendukungnya. Kendati demikian, kerap kali faktor sosial budaya diabaikan. (Yulifar, 2010)

pemerintah Desa Plajan sangatlah memperhatikan prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Karena di Desa Plajan memiliki keanekaragaman dalam beragama dan bentuk soal maka pemerintah Desa sangatlah memprioritaskan dalam hal politik sosial dan ekonomi, ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisahkan karena ketiga unsur tersebut saling berkesinambungan. Untuk

mewujudkan Desa Wisata Alam yang maju maka pemerintah Desa dan masyarakat mengadakan musyawarah melibatkan tiga unsur tersebut.

6. Memperhatikan Yang Paling Lemah Dalam Pengambilan Keputusan

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa Wisata Plajan memperhatikan semua lapisan masyarakat dan memperhatikan masyarakat yang lemah dengan cara musyawarah lalu memberikan bantuan-bantuan yang mendukung untuk masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat Desa Wisata Plajan yang juga bertujuan untuk mewujudkan Desa Wisata alam yang maju.

DESA WISATA

1. Potensi Wisata, Seni, Budaya Khas

Desa Wisata sebagai suatu bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari ke khasan Desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakatnya sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan yang harmonis, yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya.

Desa Wisata Plajan memiliki sangat banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan, mulai dari wisata alam, seni dan budaya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya Desa Wisata yang maju.

2. Lokasi Desa Masuk Dalam Rute Perjalanan Paket Wisata

Keunikan lokasi merupakan daya tarik utama yang menyebabkan terjadinya aktivitas pariwisata. Keunikan lokasi ini dapat berupa daya tarik fisik alam, sejarah dan budaya. Desa Wisata yaitu lokasi Desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual. Desa Plajan sudah memiliki rute perjalanan paket wisata, mulai dari beberapa obyek wisata hingga paket perjalanan wisata dengan penginapan.

3. Tenaga Pengelola, Pelatih, Dan Pelaku Pariwisata, Seni, Budaya

Dalam memperkuat potensi atau daya yang dimiliki di Desa Wisata Plajan diperlukan adanya pelaku-pelaku pariwisata yang memiliki kemampuan dan kemauan yang mampu mendukung Desa Wisata yang maju. Desa Wisata Plajan sudah memiliki pengelola wisata di tiap-tiap lokasi wisata. Untuk mengembangkan potensi pengelola Desa Wisata Plajan dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan dari dinas pariwisata.

4. Aksesibilitas Dan Infrastruktur Yang Mendukung

Jarak tempuh merupakan jarak dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten. Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telfon dan sebagainya harus diperhatikan dalam pengelolaan Desa Wisata. Secara umum, lokasi wisata yang ada sudah memiliki fasilitas yang memadai, tetapi masih ada lokasi wisata yang memiliki akses jalan kurang baik.

5. Terjaminnya Keamanan, Ketertiban, Dan Kebersihan

Untuk menuju Desa Wisata yang maju dukungan masyarakat sangat besar peranannya seperti menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, keramah tamahan. Sudah Adanya Petugas keamanan dan

kebersihan di Desa Wisata Plajan, tetapi belum dilaksanakan secara maksimal karena belum ada pembagian petugas yang pasti.

Penutup

Kesimpulan

Tata kelola yang dibuat oleh Pemerintahan Desa sudah cukup baik untuk mewujudkan Desa Wisata Alam yang maju, sehingga Desa Wisata Plajan disebut sebagai Desa Wisata Alam yang maju. Hal ini karena Desa Wisata Plajan memenuhi komponen **Desa Wisata yang maju** yaitu memiliki potensi Pariwisata, Seni, Budaya khas daerah setempat, lokasi Desa masuk dalam rute perjalanan paket wisata, adanya tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni, dan budaya, aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung program Desa Wisata sesuai Perbup Nomor 050/105 Tahun 2015 Dan Perbup Nomor 055/179 Tahun 2018, terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Wisata Alam Yang Maju dilihat dari 6 indikator, yaitu:

1. **Mengikutsertakan semua atau partisipasi**, dalam hal ini pemerintah Desa Plajan sudah melibatkan semua masyarakat Desa Plajan Dalam Upaya Mengelola Desa Wisata Plajan.
2. **Transparan dan bertanggung jawab**, dalam pengelolaan Desa Wisata Plajan sudah transparan dalam mengelola wisata alam dan

setiap lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengelola tempat wisata yang dimiliki.

3. **Efektif dan adil**, pengelolaan Desa Wisata Plajan sudah diterapkan dengan cara melakukan pembagian secara merata kepada setiap RW secara adil untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki di lingkungan setempat. Hal ini juga didukung oleh partisipasi seluruh masyarakat.
4. **Menjamin supremasi hukum**, pembentukan Desa Plajan sebagai Desa Wisata sudah berlandaskan kepada peraturan yang berlaku dan Peraturan Bupati Tahun 2018 yang mengatur tentang Desa Wisata Di Desa Plajan.
5. **Menjamin bahwa prioritas politik, social, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat**, pemerintah Desa Plajan dalam menentukan segala sesuatu berdasarkan musyawarah dengan masyarakat.
6. **Memperhatikan masyarakat yang paling lemah dalam pengambilan keputusan**, Pemerintah Desa Wisata Plajan memperhatikan semua semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk masyarakat yang paling lemah dalam pengambilan keputusan untuk mempertimbangan kemampuan semua masyarakat Desa Plajan.

Saran

1. Perlu diadakannya pelatihan-pelatihan rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelola Desa Wisata.
2. Perlu meningkatkan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara potensi wisata yang ada.